

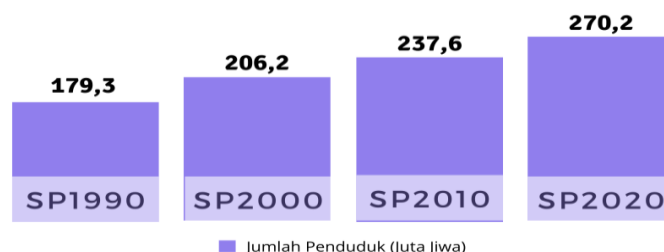
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi berbagai tantangan lingkungan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang pesat. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini membawa berbagai tantangan, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Semakin banyaknya penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan lahan, air, energi, dan infrastruktur, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Dalam menghadapi tantangan ini, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa kebutuhan saat ini dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (Malihah & Nazairin, 2024). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk di Indonesia



Sumber : <https://www.bps.go.id>, 2024

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia per 10 tahun pada tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan pada bulan

September 2020, dengan jumlah mencapai 270,2 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan hasil sensus tahun 2010, terdapat penambahan penduduk sebesar 32,56 juta jiwa. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar setelah India, China, dan Amerika Serikat. (<https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/25/180000765/20-negara-penduduk-terbanyak-di-dunia-2024-indonesia-nomor-berapa>).

Salah satu faktor penting dalam permasalahan lingkungan, yaitu tingginya jumlah penduduk. Pertumbuhan populasi yang pesat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan pangan, tempat tinggal, serta berbagai kebutuhan lainnya. Kondisi ini turut menyebabkan bertambahnya volume limbah domestik yang dihasilkan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini akan berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah (Basuki et al., 2020). Masalah kebersihan lingkungan menjadi persoalan jangka panjang yang memerlukan upaya berkelanjutan dalam penanganannya. Hal ini tidak bisa ditunda apalagi diabaikan. Jika penanganannya terlambat, upaya untuk mengatasinya akan semakin sulit.

Tabel 1.1 Timbulan Sampah Nasional Pada Tahun 2019-2023

Tahun	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)
2019	27.618.317
2020	27.592.603
2021	28.591.323
2022	38.633.706
2023	38.437.064

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa terjadi perubahan secara naik turun timbulan sampah yang ada di Indonesia. Meskipun begitu, data tersebut mengindikasikan

bahwa volume sampah yang dihasilkan masih cukup tinggi dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Namun, upaya pengelolaan sampah sejauh ini masih kurang optimal demikian, dengan didapatinya permasalahan-permasalahan mengenai sampah terutama di kota-kota besar.

**Tabel 1.2 Provinsi Penghasil Timbunan Sampah Terbesar di Indonesia
Tahun 2023**

No.	Provinsi	Jumlah Timbunan Sampah (Ton)
1	Jawa Timur	6.117.220
2	Jawa Tengah	5.510.974
3	Jawa Barat	4.279.095
4	DKI Jakarta	3.141.650
5	Sumatra Utara	1.827.494

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

Pada Tabel 1.2 berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai penghasil sampah terbesar kedua di Indonesia, dengan total timbunan sampah mencapai 5,51 ton pada tahun 2023. Sementara itu, posisi pertama ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sampah sebesar 6,11. Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara secara berurutan menempati posisi ketiga hingga kelima dalam daftar tersebut.

Lingkungan dan manusia saling terhubung sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia memerlukan kondisi lingkungan yang sehat untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dan asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana yang

dimanatkan dalam Pasal 28 H UUD RI 1945. Dengan demikian, lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi hak atas kehidupan yang sehat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang didasarkan pada dasar hukum yang jelas untuk mengatur hal tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan secara terencana dan terkoordinasi untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Kabupaten Kebumen adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen memiliki potensi wisata yang cukup banyak, salah satunya adalah Pantai Menganti. Pantai Menganti merupakan daya tarik utama bagi pengunjung untuk melakukan kegiatan wisata, tentunya banyak pendatang lokal maupun domestik yang berdatangan ke Kabupaten Kebumen, maka sudah sepatutnya Kabupaten Kebumen menjadi perwajahan kota dengan terwujudnya Kabupaten Kebumen yang bersih.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kebumen, yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk menjadikan Kabupaten Kebumen sebagai wilayah yang bersih dan sehat. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pengelolaan sampah yang efektif. Dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 13 Tahun 2023

Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tugas pemerintah daerah dalam penanganan sampah terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 13 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pada tahun 2023 Kabupaten Kebumen menerima Penghargaan Adipura dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena berhasil melakukan pengelolaan lingkungan yang baik setelah penantian 27 tahun. Penghargaan tersebut diterima pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Bupati Kebumen H. Arif Sugiyanto, S.H., M.H dengan penuh kebanggaan menerima langsung penghargaan bergengsi tersebut dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya dalam sebuah acara resmi yang diselenggarakan di Jakarta.

Gambar 1.2 Piala Adipura Kabupaten Kebumen



Sumber : <https://kebumenkab.go.id/>, diakses pada 8 Agustus 2024

Sebagai Kabupaten yang mendapatkan penghargaan Adipura, Kabupaten Kebumen dapat dikatakan telah melakukan pengelolaan sampah dengan baik, yang semestinya memang memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan penghargaan yang didapat. Program Adipura merupakan salah satu program pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Adipura bertujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat melalui penghargaan Adipura untuk mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan baik secara ekologis, social, dan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Penghargaan Adipura diberikan berdasarkan evaluasi beberapa faktor, seperti evaluasi keberadaan dan kualitas infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir yang memadai, fasilitas pengolahan sampah, dan sistem pengumpulan sampah yang efektif. Kemudian mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang ada dalam pengelolaan sampah di suatu daerah. Hal ini mencakup aspek legalitas, perencanaan, pengawasan, dan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi faktor yang dievaluasi. Ini mencakup program-program edukasi, kampanye kesadaran, dan upaya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian evaluasinya pun mencakup aspek kualitas lingkungan terkait pengelolaan sampah, seperti kebersihan kota,

tingkat pencemaran, pengendalian dan pengurangan limbah, serta upaya mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pada kenyataannya, masih ditemukan tumpukan sampah di ruas jalan Kabupaten Kebumen menjadi pemandangan yang kurang menyenangkan, baik bagi masyarakat setempat maupun bagi para wisatawan yang berkunjung. Kondisi ini menciptakan kesan buruk terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam upaya menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat. Penanganan sampah yang kurang optimal dapat berdampak negatif terhadap citra daerah, serta mengganggu kenyamanan dan kesehatan publik.

**Gambar 1.3 Penumpukan Sampah di Ruas Jalan Kabupaten
Kebumen**



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 18 Juni 2024

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang sangat penting di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kebumen. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat juga semakin besar, yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam

mengelola dan mengurangi dampak buruknya terhadap lingkungan. Sementara itu, popularitas Kebumen sebagai destinasi wisata membawa dampak positif dalam sektor ekonomi, tetapi juga menambah tantangan dalam pengelolaan limbah, terutama di kawasan wisata yang sering kali menjadi tempat penumpukan sampah. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini berpotensi menciptakan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, termasuk pencemaran tanah, air, dan udara, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di daerah tersebut.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	1.345.228	1.362.757	1.380.208	1.397.555

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Pada Tabel 1.3 menunjukkan data jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen selama periode 2020 – 2023. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.345.228 jiwa, yang kemudian meningkat menjadi 1.362.757 jiwa pada tahun 2021. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk mencapai 1.380.208 jiwa, hingga akhirnya pada tahun 2023 mencapai angka 1.397.555 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk ini tidak hanya menjadi indikator perkembangan demografis, tetapi juga memberikan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Salah

satu isu yang sering muncul seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk adalah peningkatan volume sampah, yang memerlukan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna menjaga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen.

Tabel 1.4 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Kabupaten Kebumen

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah pengunjung	854.315	966.941	1.623.865	2,151,109

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2024

Pada Tabel 1.4 menunjukkan data jumlah pengunjung di obyek wisata Kabupaten Kebumen periode 2020-2023. Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung tercatat sebanyak 854.315 orang. Meski masih dalam situasi pandemi Covid-19, angka ini mulai meningkat menjadi 966.941 orang pada tahun 2021, hal ini mencerminkan pulihnya sektor pariwisata secara bertahap.

Peningkatan jumlah pengunjung semakin tajam pada tahun-tahun berikutnya, dengan jumlah wisatawan mencapai 1.623.865 orang pada tahun 2022. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana jumlah pengunjung melonjak hingga 2.151.109 orang. Meskipun pertumbuhan jumlah pengunjung memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, terutama dalam peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, hal ini juga menghadirkan tantangan baru. Salah satunya adalah peningkatan tekanan terhadap lingkungan, seperti meningkatnya volume sampah di kawasan wisata.

Jika pada kenyataanya pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen masih belum optimal, dapat menjadi pertanyaan mengenai kesesuaian penilaian dengan kondisi aktual pengelolaan sampah di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terkait kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai **“Analisis Proses Manajemen Kabupaten Kebumen dalam Pengelolaan Lingkungan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah penduduk dan jumlah wisatawan setiap tahun memperburuk volume sampah yang dihasilkan
2. Penghargaan Adipura yang diterima oleh Kabupaten Kebumen seharusnya mencerminkan pengelolaan sampah yang baik, namun masih terdapat penumpukan sampah di beberapa ruas jalan dan ketidakaktifan bank sampah

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan secara mendasar pada bagian latar belakang maka peneliti merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana proses manajemen di Kabupaten Kebumen dalam pengelolaan lingkungan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses manajemen yang telah dilakukan oleh Kabupaten Kebumen dalam pengelolaan lingkungan

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti khususnya terkait perolehan Adipura
2. Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan proses manajemen lingkungan hidup

1.5.2 Manfaat Akademis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada topik manajemen lingkungan dan penghargaan Adipura, serta dapat memicu penelitian lanjutan yang lebih mendalam di bidang ini

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

No .	Peneliti, Tahun	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian	Nama Jurnal
1.	Salomo et al., (2021)	Manajemen Pengelolaan Sampah Bantargebang di Kota Bekasi	Untuk mengetahui manajemen pengelolaan sampah di Bantargebang Kota Bekasi	Berdasarkan temuan penelitian : Perencanaan : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengelolaan sampah dengan melaksanakan program Jakarta Berkolaborasi, yang merupakan bagian dari program samtama. Pengorganisasian : Pembagian tugas di masing-masing divisi dalam pengelolaan sampah telah dilakukan dengan baik, serta terdapat kerja sama	Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik No. 105 Vol VII, 2021 Link Jurnal : https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/34867

				antara berbagai pihak yang berkontribusi di TPST Bantargebang. Pelaksanaan : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengadakan program pelatihan dan menyediakan fasilitas serta alat yang mendukung kegiatan tersebut. Pengawasan : Kegiatan monitoring berjalan lancar tanpa hambatan, dan media yang digunakan untuk pengawasan sudah sesuai.	
2.	Malem et al., (2016)	Peranan Bagian Kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam	Untuk mengetahui peranan bagian kebersihan kecamatan lubuk pakam	Berdasarkan hasil penelitian, Keberhasilan Kecamatan Lubuk Pakam dalam meraih Piala Adipura sebanyak enam kali berturut-turut, kecuali pada tahun 2013, didorong oleh pentingnya menjaga kebersihan	Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 4 (1) (2016): 59-78

		dalam Meraih Adipura	dalam meraih Adipura	lingkungan. Bagian Kebersihan Kecamatan memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam upaya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah, meskipun menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas dan partisipasi masyarakat.	Link Jurnal : https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/894
3.	(Pramesti et al., 2023)	Perencanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada TPA Jatibarang		Perencanaan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun langkah-langkah atau proses dalam perencanaan pengelolaan sampah di TPA tersebut telah dilaksanakan dengan sistematis dan transparan, aspek-aspek mendesak seperti keterbatasan lahan dan metode pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih kurang	<i>Jurnal Of Public Policy and Management Review</i> Link Jurnal : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/38393

				mendapatkan perhatian dalam perumusan rencana pengelolaan sampah di TPA Jatibarang.	
4.	(Pandie, 2013)	Pengelolaan Persampahan dalam Mendukung Perolehan Adipura di Kota Semarang	Untuk mengetahui pengelolaan persampahan dalam meraih penghargaan Adipura di Kota Semarang	Aspek-aspek yang memengaruhi meningkatnya nilai pengelolaan sampah dalam mendukung perolehan Adipura Kota Semarang, yaitu : (1) Kelembagaan (2) Teknis Operasional (3) Pembiayaan (4) Pengaturan (5) Peran serta masyarakat,	Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota Volume 9 (1): 11-19, 2013 Link Jurnal : http://eprints.undip.ac.id/68885/
5.	(Kakesing et al., 2022)	Manajemen Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Untuk mengetahui pengelolaan sampah di Kabupaten Sitaro	Penelitian ini mengungkapkan bahwa secara umum, pengelolaan sampah di Kabupaten Sitaro berjalan dengan baik dan memadai. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun,	Jurnal Administrasi Publik No. 2 Vol VIII (2022) Link Jurnal : https://ejournal.unsrat.

		Kabupaten Sitiro		sehingga apa yang direncanakan juga terrealisasi dengan baik.	ac.id/index.php/JAP/article/view/40381
6.	Hayat & Titin Nasiatin, (2023)	Manajemen Pengelolaan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid'19	Untuk mengetahui gambaran manajemen pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) di masa pandemi covid'19	Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan limbah B3 dari rumah tangga di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat menjadi penyebab utama tercampurnya limbah B3 rumah tangga dengan limbah rumah tangga non-B3. Akibatnya, masyarakat sering kali membuang kedua jenis limbah tersebut secara bersamaan. Kondisi ini menyebabkan akumulasi limbah B3 yang bercampur terus berlangsung hingga akhirnya menumpuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).	Jurnal Ekonomi dan Bisnis No. 2 Vol 2, 2023 Link Jurnal : http://jurnal.uf.ac.id/index.php/fluralis/article/view/96/65
7.	(Yakin, 2021)	Strategi Pemerintah	Untuk mengetahui	Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam mengelola sampah	Jurnal Dialetika Vol 19 No. 2 2021

		Daerah Kabupaten Sumedang dalam Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau untuk Meraih Penghargaan Adipura	dan menganalisis strategi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meraih penghargaan Adipura.	dan ruang terbuka hijau menunjukkan bahwa upaya penanganan kedua isu tersebut belum dilakukan secara konsisten. Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu melakukan penataan ulang terhadap Ruang Terbuka Hijau. Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan masih dilakukan secara parsial dan belum mencakup pendekatan yang terintegrasi secara menyeluruh. Selain itu, penghentian kebijakan pemberian penghargaan Adipura, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk aspek politis, turut berdampak negatif terhadap pengelolaan sampah dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Akibatnya, banyak fasilitas pendukung	Link Jurnal : https://www.jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/7
--	--	---	---	---	--

				yang kondisinya masih jauh dari optimal.	
8.	Supratiwi, (2018)	Studi Ruang Terbuka Hijau dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang	Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Kota Semarang	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang sudah sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2010, dengan target minimal 30% yang tercapai hingga tahun 2013. Pencapaian ini, bersama dengan perolehan penghargaan di bidang lingkungan hidup seperti Adipura dan predikat Kota Hijau, sangat terkait dengan ketersediaan RTH. Keberhasilan memenuhi target minimal 30% RTH berkontribusi pada penghargaan yang diterima. Namun, terdapat beberapa kendala dalam	Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3, No. 2, 2018, 89-98

				pelaksanaan penataan RTH, antara lain: 1. Masalah pendanaan, 2. pengawasan & penegakan hukum	
9.	(Insani et al., 2024)	Manajemen Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang	Untuk menganalisis manajemen pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Batang	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010. Target minimal 30% RTH telah tercapai hingga tahun 2013. Keberhasilan ini berkaitan erat dengan perolehan berbagai penghargaan di bidang lingkungan hidup, seperti Adipura dan predikat Kota Hijau, yang didukung oleh ketersediaan RTH yang memenuhi syarat minimal. Meskipun demikian, pelaksanaan penataan RTH	<i>Jurnal Of Public Policy and Management Review</i> Link Jurnal : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/47496

				menghadapi beberapa kendala, di antaranya: 1. Permasalahan pendanaan, 2. Pengawasan dan penegakan hukum.	
10.	(Nigiana et al., 2016)	Manajemen Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tembalang	Untuk menganalisis manajemen pengelolaan sampah di Kecamatan Tembalang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Tembalang telah dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) melalui proses pemilahan sampah. Manajemen pengelolaan ini telah dijalankan dengan baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun, implementasinya masih belum sepenuhnya optimal sehingga	<i>Jurnal Of Public Policy and Management Review</i> Link Jurnal : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/10421

				diperlukan perbaikan di beberapa aspek untuk meningkatkan efektivitasnya.	
--	--	--	--	--	--

1.6.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses bagi sumber daya dan tenaga kerja diorganisir dan dikoordinasikan untuk merancang, menerapkan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano juga menyatakan administrasi publik sebagai suatu seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur “urusan publik” dan melaksanakan berbagai pekerjaan yang telah ditentukan. Administrasi publik sebagai bidang keilmuan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui perbaikan di berbagai bidang, seperti organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Menurut Edward H. Litchfield (dalam Syafiie, 2010), administrasi didefinisikan sebagai suatu ilmu tentang cara mengorganisasikan, memperlengkapi, meggerakkan, dan memimpin bermacam-macam lembaga pemerintahan. Sementara itu menurut Ali Mufiz (dalam Darmadi & Sukidin, 2011) secara ringkas, studi administrasi publik tidak hanya menyangkut teknik, prosedur dan mekanik, tetapi juga berkenaan dengan pengetahuan administrasi publik, dapat dilakukan sesuai spesialisasi dalam bidang kegiatan tertentu tentang metode dalam mengatur dan melakukan monitoring dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan melalui aktivitas orang lain.

Definisi terkait administrasi publik dikemukakan oleh ahli lainnya. Menurut Gerald Caiden (dalam Thoha, 2008) ilmu administrasi publik pada

dasarnya berfokus untuk menangani permasalahan terkait persoalan yang dialami masyarakat dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat. Hal ini mencakup semua hal yang dianggap sebagai tanggapan masyarakat terkait permasalahan yang memerlukan solusi kolektif bukan individu melalui intervensi pemerintah dalam bentuk yang berbeda dari intervensi swasta dan intervensi sosial.

Berdasarkan definisi administrasi publik yang telah diuraikan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang telah terjadi di dalam masyarakat. Hubungan administrasi publik dengan penelitian ini, yaitu manajemen merupakan bagian dari administrasi publik yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang ada dalam pengelolaan lingkungan.

1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen merupakan salah satu aspek dalam administrasi publik. Manajemen publik merupakan dasar yang digunakan dalam menjalankan organisasi publik. Dasar dari keilmuan manajemen publik berasal dari pernyataan Frederick W. Taylor (dalam Syafiie, 2010) yang mendefinisikan manajemen sebagai upaya yang ingin dilakukan seorang manajer dengan mempertimbangkan cara terbaik dan harga yang paling murah.

Pendapat lainnya terkait manajemen publik dikemukakan oleh Overman. Manajemen publik didefinisikan oleh Overman (dalam Keban, 2004) sebagai suatu studi interdisipliner yang mempelajari hal-hal umum

terkait organisasi, serta merupakan gabungan dari fungsi manajemen, yaitu *planning*, *organizing*, dan *controlling* yang berkaitan dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik. Definisi yang disampaikan Overman juga selaras dengan pengertian manajemen publik dari Satibi. Berdasarkan pendapat (Satibi, 2012), manajemen publik diartikan sebagai pengelolaan sektor publik yang dikerjakan oleh instansi publik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, strategi, dan evaluasi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi, dan sumber daya lainnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Laurence Lynn (dalam Wijaya & Damar, 2014) yang menfenisikan manajemen publik menjadi tiga gambaran kemungkinan, yaitu seni, bidang keilmuan, dan pekerjaan. Manajemen publik sebagai seni memiliki makna bahwa aktivitas kreatif yang dilakukan oleh para akademisi tidak dapat dipelajari dengan cara “dihitung”. Manajemen publik dimaknai sebagai bidang keilmuan karena dalam pemahamannya diperlukan sebuah analisis secara terstruktur dengan menggunakan pemahaman dan ekplanasi. Kemudian, manajemen publik dimaknai sebagai pekerjaan karena mengacu pada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya dalam mengkaji ilmu ini.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat sebuah kesimpulan yang dapat ditarik dari konsep manajemen publik berdasarkan definisi para ahli. Manajemen publik adalah upaya yang dilakukan manajer publik untuk

mengelola aspek-aspek di dalamnya melalui penerapan fungsi manajemen dan perencanaan hingga pengawasan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan terkait proses manajemen Kabupaten Kebumen dalam Pengelolaan Lingkungan, yang dalam penerapan fungsi manajemennya perlu melihat upaya dari pengelola (manajer) dalam mengelola aspek-aspek yang terdapat di Kabupaten Kebumen.

1.6.4 Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen dirumuskan oleh George R. Terry sebagai *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC). Fungsi manajemen POAC adalah fungsi manajemen yang bersifat umum dan meliputi keseluruhan proses manajerial. Dasar dari fungsi manajemen ini, yaitu pencapaian terhadap apa yang telah direncanakan. Adapun fungsi manajemen tersebut dijabarkan sebagai berikut (Terry, 2013) :

a. Perencanaan (*planning*)

Fungsi ini berupaya untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai dan juga cara-cara yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam perencanaan, yaitu melakukan survei lingkungan, menentukan tujuan, mempertimbangkan hal-hal yang ingin dilakukan, dan berhubungan dengan personel selama proses perencanaan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Fungsi ini digunakan dalam mengklasifikasikan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan dalam pelaksanaan kegiatan-

kegiatan tersebut. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pengorganisasian, yaitu menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan, bagi-bagi pekerjaan menjadi tugas setiap orang, menentukan persyaratan yang perlu dimiliki di setiap posisi, dan berhubungan selama proses pengorganisasian.

c. Penggerakan (*actuating*)

Fungsi ini bertujuan untuk mengarahkan perilaku sumber daya manusia kearah tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penggerakan, yaitu memberikan penjelasan terkait tujuan-tujuan yang ingin dicapai kepada bawahan, melatih kemampuan bawahan dalam melaksanakan tugas, memberikan pujian dan teguran dengan jujur, dan berhubungan selalu selama proses penggerakan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Fungsi ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pengawasan, yaitu menetapkan ukuran-ukuran keberhasilan tujuan, monitor hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang ditentukan, memperbaiki penyimpangan yang ada, dan berhubungan selama proses pengawasan.

Pendekatan lain terkait fungsi-fungsi manajemen dikemukakan oleh Siagian.

fFungsi manajemen terdiri dari *planning*, *organizing*, *motivating*, *controlling*, dan *evaluating*. Adapun fungsi-fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan didefinisikan oleh Siagian sebagai proses penalaran dan penentuan secara umum terkait sesuatu yang perlu dilakukan di masa depan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan merupakan sebuah keputusan yang kegunaannya baru akan dapat dirasakan setelah adanya pelaksanaan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan seluruh proses pengklasifikasian sumber daya manusia, peralatan, serta tugas dan tanggung jawab sehingga tercipta organisasi yang dapat dijalankan menjadi suatu kesatuan untuk pencapaian tujuan yang direncanakan sebelumnya.

c. Penggerakan (*motivating*)

Siagian mendefinisikan penggerakan sebagai suatu proses pemberian dorongan bekerja kepada sumber daya manusia melalui berbagai cara sehingga mereka dapat bekerja secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan dijabarkan menjadi sebuah mekanisme pengamatan bagi keseluruhan kegiatan pelaksanaan yang bertujuan menjamin setiap pekerjaan yang dilakukan terlaksana sesuai dengan rencana awal.

e. Penilaian (*evaluating*)

Penilaian diartikan sebagai proses mengukur hasil kerja yang sebenarnya dan membandingkannya dengan hasil yang ingin dicapai.

Penilaian merupakan kegiatan yang perlu dilakukan terus-menerus selama suatu organisasi masih berjalan.

Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang telah dipaparkan beberapa ahli, terdapat fungsi-fungsi dasar yang digunakan oleh manajer dalam mengelola organisasi. Fungsi-fungsi dasar tersebut, yaitu fungsi POAC yang dipaparkan George R. Terry.

1.7 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian memberikan gambaran, alur pikir dan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian berkaitan dengan teori – teori yang akan digunakan. Fokus penelitian yang akan dikaji, yaitu Analisis Proses Manajemen Kabupaten Kebumen dalam Pengelolaan Lingkungan. Fenomena penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) *Planning* (perencanaan)

- Penentuan tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya pengelolaan lingkungan
- Sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah
- Alokasi anggaran untuk mendukung perencanaan tersebut

2) *Organizing* (pengorganisasian)

- Pembentukan tim atau lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kebumen
- Pengaturan struktur organisasi dan koordinasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program

- Penyusunan SOP untuk pelaksanaan setiap langkah dalam pengelolaan lingkungan

3) *Actuating* (pelaksanaan/penggerak)

- Implementasi program-program yang telah direncanakan untuk pengelolaan lingkungan
- Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan
- Pemantauan dan penilaian berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan

4) *Controlling* (pengawas)

- Sistem pengawasan yang diterapkan untuk memantau pengelolaan lingkungan

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini memilih metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan kompleks melalui data yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan perspektif orang yang terlibat dalam fenomena tersebut (Sugiyono, 2017).

1.8.2 Situs Penelitian

Situs dalam penelitian mencakup lokus atau tempat yang menjadi pilihan di mana penelitian tersebut dilakukan. Lokus penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

1.8.3 Subjek Penelitian

Menurut Amirin (dalam Rahmadi, 2011), subjek penelitian merupakan pihak atau sumber yang dapat dijadikan sumber informasi dalam penelitian. Subjek penelitian dapat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan keterangan bagi peneliti terkait informasi yang ingin diperoleh. Subjek yang menjadi narasumber dalam penelitian ini dinamakan informan yang ditetapkan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan metode pengambilan data dengan pertimbangan khusus di mana individu yang dipilih dianggap memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan konteks yang diharapkan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kepala Bidang PPKLHPP Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen
- 2) Kepala Bidang PPKL Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen
- 3) Subkoordinator Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data : teks atau kata-kata dari sumber tidak langsung, biasanya berupa dokumentasi arsip resmi, jurnal, dan informasi dari internet sebagai bahan pendukung dan pembanding, sedangkan jenis data yang kedua, yaitu berbentuk kata-kata berasal dari hasil wawancara yang dilakukan antara peneliti dan informan sehingga dapat mendeskripsikan atau menginterpretasikan, tindakan, program, maupun peristiwa yang berkaitan dengan judul penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu :

1) Data primer

Sugiyono (2017) berpendapat bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan informasi kepada peneliti secara langsung. Data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat di mana penelitian tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer melalui wawancara yang dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait.

2) Data sekunder

Menurut Sugiyono (2017), data sekunder merupakan sumber informasi yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari pihak lain atau melalui dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data sekunder melalui dokumen, laporan, dan arsip.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017) berpendapat bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dengan beragam konteks, berasal dari berbagai sumber, dan melibatkan metode yang beragam. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan gejala secara sistematis pada objek penelitian. Pada penelitian ini, observasi dilakukan di Kabupaten Kebumen untuk melihat sejauh mana proses manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan lingkungan.

2. Interview (wawancara)

Wawancara digunakan apabila peneliti menginginkan pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek tertentu yang didapat dari informan dengan jumlah informan yang terbatas. Proses wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, juga dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan-pertanyaan tertulis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui sebuah dokumen, yaitu berupa gambar, arsip, dokumen resmi yang didapat dari berbagai sumber.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2017) analisis data merupakan kegiatan pengumpulan dan penataan data yang telah didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses tersebut dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan masing-masing kategori, memecah ke dalam aspek-aspek terpisah, penyusunan data dalam pola tertentu, pemilihan elemen-elemen yang relevan untuk ditelaah, serta penyusunan kesimpulan agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis data berbasis kualitatif yang melibatkan tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan pengolahan data yang meliputi penyaringan dan pengkodean data yang telah didapat. Reduksi data mencakup pemilihan elemen-elemen utama yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan menyaring data yang tidak memiliki relevansi untuk fokus penelitian yang diinginkan.

2. Penyajian data

Penyajian data meliputi kumpulan informasi yang telah melewati proses reduksi dan telah disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk penarikan atau pengambilan tindakan.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik dari hasil data di lapangan. Verifikasi diambil berdasarkan reduksi data,

sementara penyajian data merupakan jawaban atau masalah yang diteliti dalam sebuah penelitian.

Dari ketiga langkah analisis dan interpretasi data tersebut saling memiliki peran yang penting antara satu sama lain di mana ketika peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah data diperoleh akan dilakukan tahap selanjutnya, yaitu reduksi data atau merangkum setiap data dengan melihat kaitan yang sesuai dengan topik yang ingin diteliti, yaitu penelitian ini berfokus pada Analisis Proses Manajemen Kabupaten Kebumen dalam Pengelolaan Lingkungan. Tahap berikutnya dilakukan dalam bentuk uraian singkat seperti bagan atau hubungan antar kategori. Penyajian data dapat berupa teks naratif, grafik, matriks, tabel, atau jejaring kerja. Tahapan terakhir adalah membuat kesimpulan dari data dan informasi yang telah diperoleh.